

# POTENSI KONFLIK DIBALIK MUNCULNYA KOMUNITAS BERPAGAR (GATED COMMUNITY)

GRENDI HENDRASTOMO

*Fakultas Ilmu Sosial, Universitas, Negeri Yogyakarta  
e-mail: ghendrastomo@yahoo.com*

## Abstrak

Perkembangan masyarakat perkotaan mendorong pergeseran berbagai bentuk perilaku, kebiasaan dan budaya. Masyarakat kontemporer cenderung mengeser arah keterlibatan masyarakat menjadi semakin mandiri dan semakin individualis, termasuk didalamnya dalam pilihan untuk berkelompok. Eksklusivitas dan kesamaan stratifikasi mendorong sebagian orang untuk memilih tempat tinggal. Inilah yang mendorong kecenderungan munculnya perumahan-perumahan dari kategori elit sampai minimalis yang memberikan kesamaan kelompok sosial. Munculnya kelompok social berdasarkan pemilihan ruang yang sama disatu sisi disadari sebagai gaya hidup baru masyarakat kontemporer, tetapi di sisi lain menimbulkan potensi konflik yang berakar dari kesenjangan yang muncul antara komunitas berpagar dengan komunitas tradisional (kampung). Potensi konflik muncul akibat kesenjangan ekonomi, ketercerabutan interaksi social dengan masyarakat sekitar yang menimbulkan pertentangan, konflik hingga vandalisme. *Gated community* tidak bisa dihindarkan dari perkembangan kota, tetapi meminimalkan potensi konflik akibat segregasi sangat mungkin dilakukan.

*Kata kunci: konflik, komunitas berpagar, perkembangan masyarakat*

## Pendahuluan

Perkembangan kota Yogyakarta 10 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang luar biasa. Efek perkembangan kota memberikan gairah bagi warga kota tetapi disisi lain juga menimbulkan eksek negatif terutama bagi berkurangnya (degradasi) aspek sosial, meningkatnya segregasi hingga kemunculan masyarakat individualis

yang 'anti sosial'. Perkembangan kota disatu sisi memang dibutuhkan demi kemajuan peradaban dan penyulut pertumbuhan ekonomi, tetapi disisi lain kadang-kadang faktor lain yang lebih tradisional tidak menjadi bahan pertimbangan.

Merebaknya rumah-rumah mewah di daerah utara Yogyakarta, munculnya Mal-mal megah, supermarket yang menggusur pasar tradisional hingga

kemunculan cafe-cafe yang bersanding dengan angkringan-angkringan, warung sederhana, memunculkan kekhawatiran yang akan munculnya pertentangan kelas sosial. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan, perselisihan antara lokalitas dengan modernitas (kapitalisme). Kondisi ini masih ditambah dengan ketidakberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat. Mal-mal didirikan dengan menggusur pemukiman rakyat, pasar tradisional dimatikan pasarannya dengan pemberian ijin pasar-pasar modern (supermarket, hypermarket), hingga pengalihan tanah-tanah produktif untuk ditanami beton-beton perumahan kelas menengah hingga kelas mewah yang tidak hanya berkontribusi pada meningkatnya kepadatan tetapi juga menurunkan kualitas lingkungan yang ditandai dengan menurunnya mutu kualitas air tanah karena hilangnya daerah resapan.

Kemunculan Mal dan Perumahan menunjukkan eksklusivitas mulai meningkat. Orang cenderung akan berbelanja ke mal, punya rumah di perumahan elit untuk menunjukkan eksklusivitas mereka. Kondisi ini lambat laun akan memunculkan segregasi yang melebar seiring dengan kemunculan lahan-lahan eksklusif yang dikuasai orang-orang tertentu.

Banyak konflik terjadi akibat pembangunan Mal dan perumahan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan sosial masyarakat. Kasus pembangunan Mal Saphir Square di Yogyakarta, antara pihak developer mal dengan warga sekitar yang menuntut pembayaran ganti rugi tanah dan ganti rugi kerusakan akibat pembangunan mal, hingga keinginan warga untuk mempertahankan jalan kampung

yang membelah Mal turut meramalkan berita media massa beberapa tahun yang lalu. Konflik ini terjadi karena aspirasi warga tidak didengarkan dan developer tidak memberikan solusi yang jelas tentang keberatan yang diajukan warga.

Awal April 2008 konflik terjadi antara penghuni perumahan Darmo Satelit Surabaya yang merupakan salah satu perumahan elit dengan warga sekitar. Warga yang marah memblokir gerbang masuk dengan cara mengelas portal besi di perumahan mewah tersebut (Kamil, 2008). Dalam hal ini portal besi merupakan simbol rasa aman dan eksklusivitas berubah menjadi simbol keterasingan dan keterungkungan penghuni sekitar dari lingkungan masyarakat.

Hal serupa juga terjadi di Cimanggis Depok, ketika puluhan warga di sekitar perumahan mewah Vila Pertiwi memprotes keberadaan tembok pembatas yang mengelilingi perumahan mewah ini. Tembok setinggi 2.5 meter tersebut digugat karena dianggap membuat gelap lorong sirkulasi di perumahan miskin yang ada dibelakangnya. Keberadaannya juga menyalahi aturan karena sebelumnya tembok ini tidak tergambar di site plan (Kamil, 2008)

Kasus-kasus tersebut mengilustrasikan maraknya akncaman friksi sosial yang lahir dari fenomena negative eksklusivitas perumahan yang disebut sebagai *gated community* (komunitas berpagar). Praktek pembentengan kawasan perubahan dengan akses tunggal sedikit banyak merupakan refleksi dari melemahnya dimensi sensitivitas sosial masyarakat.

Keberadaan komunitas berpagar

(*gated community*) di Yogyakarta mulai tumbuh seiring dengan meningkatnya urbanisasi ditambah dengan faktor Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota yang dikenal *adem ayem* menyebabkan banyak orang luar yang membeli tanah atau bangunan di Yogya untuk tempat tinggal anak-anak mereka atau mempersiapkan diri untuk hari tua. Kondisi ini mau tidak mau menyebabkan meningkatnya harga jual tanah dan bangunan di wilayah Yogyakarta khususnya Yogya bagian utara (Sleman). Meningkatnya permintaan menyulut potensi pasar yang diakomodir oleh para developer.

Indikator munculnya *gated community* di Yogyakarta tertangkap dengan tumbuh suburnya perumahan-perumahan mewah dengan nilai bangunan 500 juta ke atas. Komunitas ini bertingkah laku eksklusif dan menimbulkan segregasi dengan lingkungan sekitarnya. Setiap perumahan pasti membentuk sebuah cluster dengan batas tembok-tembok tinggi dengan akses masuk tunggal yang dijaga satpam 24 jam. Semua fasilitas yang ada didalam perumahan menjadi hak eksklusif penghuni. Setiap tamu yang masuk diperiksa dengan ketat. Kondisi ini sebenarnya memberikan simbol bahwa keamanan dan privasi menjadi aspek penting tetapi disisi lain hal ini lambat laun akan menimbulkan kesenjangan yang akhirnya bisa memicu konflik sosial dengan masyarakat asli (sekitar).

Ironisnya lagi komunitas berpagar tidak hanya terjadi di perumahan-perumahan mewah (elit) tetapi sudah merambah ke berbagai bentuk bangunan yang menyiratkan (simbol) eksklusivitas. Kalau kita cermati daerah Yogyakarta mulai tumbuh rumah-rumah

yang dibangun ditengah-tengah masyarakat asli tetapi memiliki pagar rumah tinggi dan tertutup dengan pos satpam di depannya. Konteks eksklusivitas juga mulai diproduksi oleh golongan menengah bahkan bawah dengan munculnya perumahan-perumahan kecil terdiri dari 4 rumah tetapi membatasi lingkungannya dengan tembok yang memisahkan komunitas mereka dengan masyarakat sekitar. Di kalangan bawah mulai muncul rumah-rumah susun yang membatasi sifat sosial masyarakat. Kondisi ini dikawatirkan akan memicu individualitas egoism yang semakin tinggi yang bisa memicu konflik sederhana hingga konflik kelas bahkan konflik etnis. Tulisan ini kemudian akan mencoba menganalisis potensi konflik yang bisa muncul akibat munculnya komunitas berpagar di Yogyakarta.

## Pembahasan

### Urbanisasi dan Gaya Hidup Kota

Urbanisasi adalah akibat logis dari pembangunan berbasis industri yang dianut oleh banyak negara-negara berkembang di dunia termasuk Indonesia. Bias perkotaan ini mengakibatkan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Bank Dunia memperkirakan bahwa 80 persen dari pertumbuhan ekonomi akan terjadi di kota-kota besar. Urbanisasi memang sedang terjadi dengan skala yang sangat pesat di seluruh dunia. Jika pada tahun 1975 hanya sepertiga dari penduduk dunia tinggal di kota, pada tahun 2025 dua-pertiganya akan tinggal di kota-kota. Satu dekade yang akan datang, 3,3 miliar penduduk dunia akan tinggal di kota-kota besar (PBB, 1994).

Ledakan ukuran kota-kota besar dunia juga mencengangkan 27 juta orang tinggal di Tokyo, Jepang, 16,4 juta di Sao Paulo, Brazil, 15 juta di Bombay, India. Dampak dari ukuran kota-kota ini tentulah mengakibatkan tekanan besar pada lingkungannya. Di Indonesia, pembangunan perkotaan yang merupakan akibat dari industrialisasi dapat dilihat dari perkembangan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, yang menjadi pusat-pusat industri sejak dulu (Rahmah, 2004).

Dalam strategi pembangunan yang berbasis industrialisasi, baik substitusi impor maupun orientasi ekspor, sektor perdesaan dengan sistematis ditindas. Hal ini dilakukan untuk dua maksud: pertama, untuk menekan harga pangan serendah mungkin, dan, kedua, untuk mendorong urbanisasi. Penduduk desa yang datang berbondong-bondong ke kota adalah "buruh murah" untuk industrialisasi yang ada di kota-kota besar. Diharapkan, tersedianya buruh murah akan mendorong berkembangnya investasi di sektor industri, terutama yang labor intensive. Akibatnya, penduduk yang tinggal di kota-kota besar meningkat dengan pesat. Jika pada tahun 1990 pada saat penduduk Indonesia 180 juta sepertiganya, sekitar 55 juta, tinggal di kota, pada tahun 2020 diperkirakan setengah dari 250 juta penduduk Indonesia, 125 juta, tinggal di kota (Rahmah, 2004).

Ini berarti bahwa selama 30 tahun, urbanisasi di Indonesia meningkat 300 persen, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun setinggi 3,5 persen. Industrialisasi di Indonesia juga sangat terpusat di Pulau Jawa. Akibatnya, tingkat perpindahan penduduk dari pulau lain ke Jawa menjadi sangat

tinggi. Akibatnya pula, urbanisasi terjadi paling banyak di Pulau Jawa 7 dari 10 kota berpenduduk lebih dari 1 juta orang terdapat di Pulau Jawa.

Menurut Dowal dan Leaf (Rahmah 2004), sebagai akibat dari pola pembangunan kota yang terlalu ad-hoc ini maka bermunculanlah pola permukiman yang menunjukkan adanya dwi-wajah (Yogyakarta sebagai salah satu contoh) permukiman formal dan informal. Permukiman formal di Yogyakarta yang berupa real estate, perumahan mewah dan kawasan permukiman yang tertata rapi, tumbuh berdampingan dengan pola kampung tradisional. Terlepas dari kusutnya permasalahan di bidang properti saat ini, masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan di Indonesia sebagian besar mendapatkan tempat tinggalnya melalui proses-proses yang lazim disebut informal housing. Sebuah studi yang sangat komprehensif yang pernah dilakukan di Indonesia bahkan memperkirakan bahwa 85 persen penyediaan tempat tinggal baru dipasok melalui proses informal, di luar penyediaan rumah formal melalui para pengembang.

Sementara itu penguasaan tanah berskala besar dan mega dimungkinkan melalui praktek-praktek KKN di masa lalu antara pengembang dan penguasa. Beberapa pengembang dapat mengubah peruntukan tanah (zoning), dan mendapatkan ijin penguasaan suatu area berskala besar meskipun proses pembebasan tanah di daerah tersebut di mulai. Dari ijin penguasaan tanah yang diberikan, kurang lebih hanya 35 persen yang bisa dibebaskan dan dibangun. Karena hal ini maka tidak jarang kita lihat bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pengembang tidak sempurna, misal-

nya adanya suatu "pulau" perumahan tradisional di tengah kompleks, ataupun bentuk kompleks perumahan yang tidak teratur. Tidak jarang juga timbul konflik antara para penduduk yang tidak mau dibebaskan dengan pengembang yang kebanyakan berada pada seputar issue akses dan prasarana umum (Rahmah, 2004)

Sementara itu, para ahli sosiologi perkotaan juga melihat kota di negara berkembang sebagaimana Jakarta, sebagai simbol dari ketidakadilan. Fenomena ketimpangan sosial ini ditunjukkan secara kontras, bagaikan sebuah panggung, pada kehidupan kota. Dalam skala kecil, berkurangnya kerekatan sosial di permukiman merupakan akibat dari kekurangpekaan perencanaan kota dalam merancang dan membangun kotanya. Pelebaran jalan, walaupun pada satu sisi akan memperlancar arus lalu lintas, pada sisi lainnya ternyata menghilangkan nilai-nilai sosial kewargaan. Jalan di permukiman, sebagaimana juga di banyak kota negara berkembang lainnya, merupakan tempat dimana interaksi sosial terjadi (the place of sosial interaction).

Penelitian yang dilakukan oleh Allan Jacobs dan Donald Appleyard (1987) tentang interaksi penghuni dan lebar jalan memperlihatkan betapa akan terjadi pengurangan interaksi dengan makin diperlebarnya jalan permukiman. Itulah sebabnya maka kita tidak perlu heran melihat makin maraknya pertikaian antar warga yang hanya dibatasi oleh sebuah jalan saja (Jacobs & Appleyard, 1987)

Tanpa disadari oleh banyak orang, kota-kota di Indonesia meniru perkembangan kota-kota di negara maju dalam melakukan segregasi se-

cara kontras. Kurangnya rasa aman bagi sebagian penduduk telah menyebabkan timbulnya *gated community*, komunitas yang secara semu dipisahkan dari sekitarnya melalui dinding-dinding tinggi ataupun pagar-pegar yang kokoh. Konflik antar warga di kawasan permukiman Pesona Kahyangan di Depok misalnya, merupakan bukti bahwa segregasi melalui penciptaan komunitas yang terisolir ini akan menimbulkan permasalahan sosial di kemudian hari (Rahmah, 2004). Edward Blakely, seorang professor dari Berkeley yang melakukan penelitian tentang *gated community* di Amerika Serikat, menemukan bahwa sistem sosial kemasyarakatan semu yang ada di dalam komunitas yang terisolirpun tidak akan berkembang dengan baik (Blakely & Snyder, 1997). Di sisi lain, tingkat kecemburuan dan konflik antara masyarakat sekitar dan masyarakat di dalam "tembok" akan semakin tinggi karena kemungkinan hilangnya tempat-tempat ataupun akses yang selama ini dianggap sebagai *public goods*.

Peningkatan kemunculan *gated community* juga dipicu gaya hidup sebagian besar warga kota yang ingin meningkatkan citra diri dan eksklusivitas dengan tinggal di permukiman mewah, atau dengan membangun pagar besi kokoh untuk menjaga keberadaan harta benda mereka. Hal ini juga mengindikasikan belum berjalannya sistem keamanan (polisi) yang terpercaya yang sanggup menjaga keamanan dan keselamatan mereka.

### **Komunitas berpagar (*Gated community*) di Yogyakarta**

Komunitas berpagar (*gated com-*

munities) adalah salah satu tipe bentuk permukiman kota yang memakai pagar keliling untuk mendefinisikan identitas teritorialnya. Pemagaran ini dari sisi lingkungan adalah upaya *defensive* masyarakat untuk menciptakan *defensible space* untuk meminimalisir terjadinya tindak kriminal di lingkungan mereka (sebagai mekanisme *deterrence*) (Maharika, 2007). Namun dalam konteks kota, pemagaran ini merupakan bentuk privatisasi ruang yang memicu fragmentasi kota dan disintegrasi sosial. Komunitas berpagar adalah satu tipe bentuk permukiman yang memiliki pagar keliling untuk mendefinisikan identitas sosialnya, gaya hidup dan keamanan lingkungannya.

Akses masuk ke komunitas ini dikontrol oleh gerbang dan penjagaan yang ketat untuk meminimalisir orang luar masuk dengan bebas (Landman, Karina, 2000). Alat pengaman yang digunakan berupa portal untuk membatasi lalu lintas, dengan satuan pengamanan (satpam), hingga alat canggih (CCTV). Terkadang pula komunitas ini mempunyai peraturan khusus atau konsensus bagai warganya untuk mempertahankan eksklusivitas mereka. Pemukiman model ini dapat berupa perumahan baru yang berpagar (*gated real estate housing*) ataupun perubahan dari kampung kota menjadi komunitas kampung berpagar (*barricaded communities*). Bentuk-bentuk pemagaran ruang kota seperti ini dianggap menjadi salah satu pemicu terjadinya fragmentasi yang berujung pada konflik bahkan kekerasan (Blakey & Snyder, 1997)

*Gated community* yang ditandai dengan adanya 'border' di lingkungan perumahan mulai merambah

Yogyakarta. Kemunculan perumahan-perumahan elit (Merapi View, Griya Nandan Permai, Casa Grande dll) telah merubah struktur sosial kota ini. Kota Yogyakarta yang selama ini diklaim sebagai kota yang aman, nyaman dan ramah ternyata telah mengalami pengikisan komunalitas. Praktek pembentengan kawasan perumahan dengan tembok tinggi dan akses tunggal ini memang sedikit banyak merefleksikan melemahnya dimensi sensitivitas sosial masyarakat di kota-kota besar.

Keguyuban yang selama ini menjadi identitas masyarakat Yogyakarta pun mulai dipertanyakan eksistensinya. Penyebab lahirnya gejala *Gated community* dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Pertama adalah aspek prestise, dimana tinggal di kawasan elit berbenteng ini dianggap sebagai media imaji untuk menaikkan status sosial. Kaum menengah ke atas merasa status sosial mereka 'naik' jika mereka hidup di suatu lingkungan khusus dan tidak berbaur dengan warga 'kampung'. Tidak adanya kesadaran sosial karena kegagalan bertukar nilai membuat hunian antara keduanya terfragmentasi secara fisik dan sosial. Kedua adalah aspek ekonomi, dimana dalam sudut pandang developer, kawasan eksklusif *gated community* dinilai akan mampu menaikkan nilai lahan dan mudah untuk dijual. Sedangkan yang ketiga adalah aspek keterpaksaan, dimana pembentengan ini memang kadang terpaksa dilakukan karena berada di kawasan kota yang sangat rawan kriminalitas. Padahal, selama ini Yogyakarta dikenal sebagai kota yang aman.

Alasan keamanan yang menjadi salah satu dasar bergabungnya seseorang di dalam *Gated community*

merupakan alasan yang tidak cukup berdasar karena secara sosial justru akan menimbulkan friksi sosial terhadap pemukiman di sekitarnya dan berpotensi akan timbulnya konflik sosial. *Gated community* dianggap sebagai orang yang tidak kompak terhadap visi, misi dan norma – norma yang telah ditetapkan warga asal. Disorientasi peer group yang ditunjukkan oleh *Gated community* juga dapat dipicu dari adanya fenomena OKB (orang kaya baru) yang merasa terpisah secara kultural dari warga asli dan menunjukkan privilese-nya dengan mengasingkan diri dari mereka.

*Gated community* di Yogyakarta memiliki beberapa keunikan jika dibandingkan dengan di daerah lain. Pertama, terdapat beberapa perumahan dengan rumah mungil yang turut mengadopsi konsep *Gated community*. Terdapat beberapa perumahan di daerah Sleman dengan ukuran rumah 70m<sup>2</sup> yang hanya terdiri dari beberapa unit rumah dengan desain modern dan mengisolir diri mereka (secara fisik) dari warga asli dengan palang. Pemilik rumah ini biasanya keluarga muda atau kalangan menengah yang ingin menerapkan gaya hidup 'modern' sesuai dengan kemampuan mereka. Kedua, tidak sedikit *Gated community* di Yogyakarta yang masih mempertahankan 'guyub ala kampung'. Diadakannya arisan, kerja bakti bahkan ronda malam di komplek perumahan saya menghindarkan warga dari individualisme yang berlebihan. Warga 'dipaksa' untuk tetap komunal walau pun secara fisik rumah mereka terpisah. Namun tidak disangkal, komunalitas ini bersifat eksklusif. Satpam yang dipekerjakan pun berfungsi untuk meminimalisir kriminalitas dan konflik yang menu-

rut warga kompleks dapat dipicu oleh warga desa sebelah. (Penelitian Ull, 2006)

Fenomena *Gated community* di Yogyakarta cenderung menyebar tidak merata, sporadis. Pembangunan perumahan di Yogyakarta tidak memusat, bahkan cenderung selalu mencari daerah yang masih subur. Adanya keinginan kalangan menengah Yogyakarta untuk hidup di daerah yang masih asri ditanggapi developer dengan membangun perumahan di daerah pinggiran Sleman atau Bantul. Pengembangan wilayah yang lebih mementingkan kaum berpunya meminimalisir kesempatan masyarakat asli untuk melakukan hal serupa.

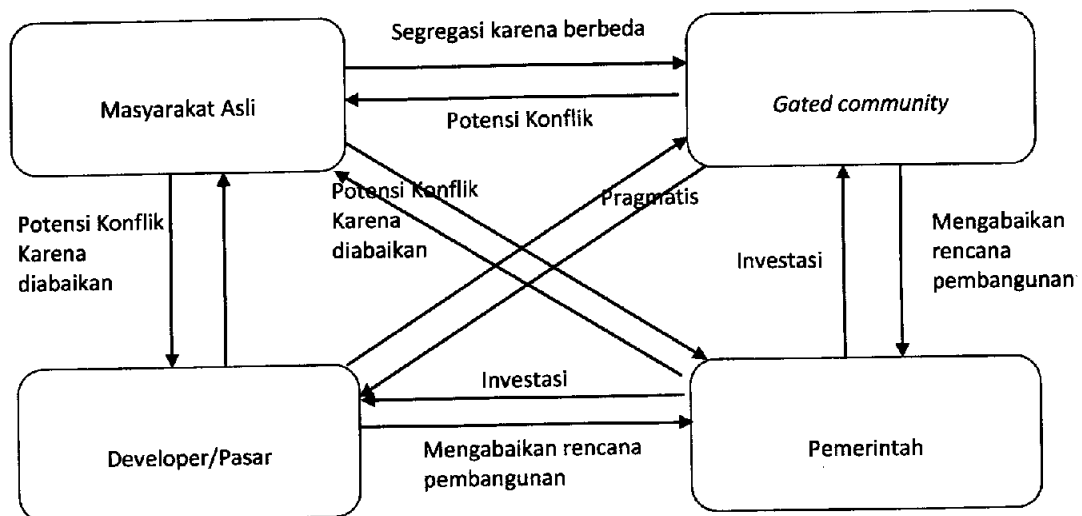
Dalam ranah spasial komunitas berpagar berpotensi memicu masalah perkembangan kota *urban sprawl* (perkembangan kota yang tidak beraturan) dan privatisasi ruang publik yang tidak terkendali. (Penelitian Ull, 2006). Dalam ranah sosial, polaritas masyarakat kaya-miskin yang berdampingan secara terang-terangan dan sentimen asli-pendatang menyimpan potensi ketegangan sosial dan kegagalan untuk menciptakan tatanan sosial masyarakat baru yang harmonis. Hal ini akan membentuk kecenderungan kemunculan sikap antipati dan menentang dari masyarakat asli terhadap komunitas berpagar ini.

### **Potensi Konflik akibat Komunitas berpagar**

Merebaknya komunitas berpagar memicu kekhawatiran munculnya perselisihan yang berujung pada konflik antara anggota komunitas dengan masyarakat asli. Prosedur alih guna

tanah yang lebih didorong oleh faktor ekonomi akan turut memicu terjadinya konflik kelas yang bermula dari terciptanya segregasi sosial. Kebanyakan penduduk setempat menjual tanahnya karena alasan ekonomi dan sebaliknya penduduk pendatang (pembeli) memiliki kelebihan ekonomi dibanding penduduk asli (pemilik tanah) konflik akibat interaksi sosial yang dipicu kurang pahaman pendatang terhadap budaya tradisional akan memicu segregasi sosial diantara mereka. Menurut Simmel (Habib, 2004), kecenderungan kemunculan konflik sosial akan terwujud ketika interaksi terganggu yang akan mengakibatkan konsekuensi konflik bagi keberlangsungan interaksi sosial.

Potensi konflik akibat munculnya komunitas berpagar merupakan salah satu bentuk konflik tertutup (*latent*) yang sebenarnya tidak tampak tetapi terus berkembang. Menurut Malik (2003), konflik dapat berwujud atau berproses dari konflik tertutup (*latent*), konflik mencuat (*emerging*) dan konflik terbuka (*manifest*). Konflik tertutup dicirikan oleh adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang dan juga belum terangkat ke permukaan, karena itu seringkali para pihak yang berkonflik tidak menyadari adanya potensi konflik. Konflik mencuat (*emerging*) muncul ketika para pihak yang berkonflik mulai menyadari ada perbedaan diantara mereka, masalah yang memicu konflik



cukup jelas tetapi proses penyelesaian konflik belum berkembang. Konflik terbuka *manifest* muncul ketika konflik diantara pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam perselisihan yang terjadi.

Kecenderungan untuk menjadi konflik yang terbuka inilah yang diusa-

hakan tidak terjadi akibat maranya komunitas berpagar. Konflik yang muncul selama ini berada pada tataran konflik tertutup *latent* dan ada kalanya mencuat (*emerging*) walaupun belum mengarah pada konflik terbuka.

Munculnya potensi konflik dite-ngarai karena beberapa sebab selain



perubahan kepemilikan tanah dan eksklusivitas penghuninya. Menurut Mochran (2003) sumber konflik dapat berasal dari berbagai hal (1) Sumber daya yang langka, (2) Kebutuhan identitas manusia terancam, (3) ketidakseimbangan structural, kelompok dominan mendominasi, (4) informasi yang tidak akurat, (5) tujuan bersaing, (6) hubungan antar sesama yang buruk.

Dalam konteks komunitas berpagar, potensi konflik bisa dipicu karena hubungan antar sesama yang buruk yang didahului oleh ketidakseimbangan structural akibat munculnya segregasi sosial, dominasi dari komunitas berpagar terhadap masyarakat asli. Penyingkiran dan peminggiran dengan memandang remeh masyarakat asli akan membawa kepada kemunculan konflik kelas sosial. Kemunculan konflik kelas sosial ditengarai akan muncul ketika segregasi semakin lebar. Walaupun selama ini kemunculan konflik kelas sosial sangat jarang bahkan belum pernah terjadi. Kekhawatiran juga muncul ketika konflik kelas sosial justru memicu konflik identitas yang justru lebih berbahaya.

Dalam konteks komunitas berpagar, potensi konflik yang muncul bisa melibatkan 4 pihak yaitu masyarakat asli, *gated community*, developer dan pemerintah. Berikut gambaran potensi konflik yang bisa muncul.

Konflik bisa muncul antara masyarakat asli dengan pemerintah akibat keinginan pemerintah untuk mengembangkan pasar property untuk menarik investasi, masyarakat asli menjadi obyek pembangunan yang dimarginalkan yang mana akan memicu konflik terhadap developer, pemerintah dan *gated community*. Pada

kondisi ini *gated community* memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan pemerintah tetapi disisi lain mereka tidak pernah memikirkan akibat bagi masyarakat sekitar.

Perselisihan antara masyarakat asli dengan *gated community* biasa dipicu oleh silang sengketa penggunaan fasilitas umum. Pada *gated community* seluruh lahan kawasan dimiliki oleh penghuni, termasuk jalan-jalan dan fasilitas sosial lainnya, yang berada didalam kawasan. Di Indonesia pada umumnya untuk menjamin keamanan dan eksklusivitasnya dibangunlah portal-portal untuk memagari hunian mereka, sehingga masyarakat sekitar tidak bisa mengakses jalan umum ditengah pemukiman. Kondisi ini terjadi akibat salah persepsi dalam memaknai aturan. Padahal dalam peraturan dikemukakan bahwa jalan-jalan dan fasilitas sosial di lingkungan permukiman diserahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi milik umum (Kompas, 2001), sehingga portalisasi tidak bisa dilakukan seenaknya. Portal yang menjadi penanda *gated community* di Indonesia mulai banyak diperbincangan akhir-akhir ini. Diawali di ibukota Jakarta mulai 29 Mei 2009 lalu mulai dilakukan pembongkaran portal-portal jalan. Sebelumnya pembongkaran portal ini dilakukan karena mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dasar hukum pembongkaran portal sendiri mengacu pada UU no 38 tahun 2004 tentang Jalan (kabarindonesia.com).

Pada akhirnya membongkaran portal tersebut bisa dimaknai sebagai upaya pemerintah meminimalisir terjadinya konflik yang dipicu oleh melebarnya jurang kesenjangan sosial. Kondisi ini tentu saja akan berpenga-

ruh pada keamanan dan eksklusivitas dari permukiman mewah, tetapi secara sosial justru akan meningkatkan komunikasi sosial antara warga pemukiman dengan warga sekitar sehingga konflik bisa dihindari.

### Penutup

Keberadaan dan semakin maraknya *gated community* di Yogyakarta di satu sisi menimbulkan kecemasan akan pemisahan kultur budaya local yang terhegemoni oleh kultur budaya modern. Modernitas yang dicirikan dengan individualism yang semakin meningkat akan memperlebar kerekatan sosial masyarakat. Penciptaan eksklusivitas menjadi sesuatu hal yang biasa dan terjadi di hampir semua pemukiman terutama pemukiman mewah di Yogya. Interaksi sosial terjalin dalam komunitas elit mereka dan jauh dari jangkauan masyarakat asli. Penciptaan eksklusivitas ini ironisnya tidak hanya terjadi di dalam perumahan-perumahan, tetapi mulai masuk ke dalam kampung-kampung pinggiran kota yang menciptakan barikade tembok pagar tinggi tertutup yang memberikan sekat antara rumah pribadi dengan masyarakat sekitar. Orang lain untuk melongok dan memandang rumah saja tidak bisa.

Kondisi ini lambat laun akan membuat stigma kaya miskin dan menganggap adanya perbedaan kelas sosial di masyarakat yang berujung pada mudah disulutnya emosi masyarakat dengan hal-hal kecil.

Tidak mustahil, suatu saat akan timbul *gap* yang cukup tajam antara *Gated community* dengan warga desa.

Dua lapisan masyarakat ini memiliki gaya hidup dan cara berpikir yang berbeda satu sama lain namun *Gated community* selalu mencoba memasuki wilayah warga desa dengan membangun permukiman mewah baru. Tidak mustahil pula semua warga Yogyakarta mengadopsi gaya hidup *Gated community* yang dianggap modern dan lebih baik. Jika hal ini terjadi, tentu nilai-nilai kultural dan ciri khas Yogyakarta sebagai kota yang penduduknya ramah, guyub dan suka menolong akan terkikis dan menjadi lebih individualistis, seperti layaknya kehidupan penduduk di kota-kota besar dunia.

Oleh sebab itu tak bisa dipungkiri untuk sesegera mungkin mencegah potensi konflik yang muncul akibat *gated community* dengan memperkuat kohesi sosial warga masyarakat, menerapkan berbagai peraturan dan mulai membangun hunian yang berkorelasi dan terbuka bagi masyarakat sekitar.

### Daftar Pustaka

- Blakely & Snyder, 1997. *Fotress America. Gated community in the United States*. Washington DC: Brookings Institution Press
- Blandy, Sarah, *Gated communities in England: historical perspectives and current developments*. *GeoJournal* No. 66. 2006 pp.15-26
- Coy, Martin, *Gated communities and urban fragmentation in Latin America: the Brazilian experience*. *GeoJournal* No. 66. 2006 pp.121-132
- Dahrendorf, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: Rajawali Press
- Habib, Achmad, 2004. *Konflik Antaretnik di Pedesaan*. Yogyakarta: LKIS
- Jacobs dan Appleyard, 1987. *Toward an Urban Design Manifesto*
- Kriesberg, Louis, 1998. *Constructive Conflict*. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers

- Landman, Karina, 2000. *Gated communities and Urban Sustainability: Taking a Closer Look at The Future*
- Malik, L, dkk, 2003. *Mengembangkan Kekeuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atasi Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala
- Miall et all., 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press
- Anonim, 2006. Studi Implikasi Spasial dan Sosial Perkembangan Komunitas Berpagar (Gated communities) dan Prospek Penatalaksanaan Ruang-nya: Studi kasus Yogyakarta (Laporan penelitian) [online] tersedia pada URL: <[http://www.ftsp1.uui.ac.id/twiki/bin/viewfile/Proyek/GatedCommunitiesResearchGroup?rev=1;filename=2006\\_LAPORAN\\_2.doc](http://www.ftsp1.uui.ac.id/twiki/bin/viewfile/Proyek/GatedCommunitiesResearchGroup?rev=1;filename=2006_LAPORAN_2.doc)> [diakses pada 14 Juni 2009]
- Anonim, gated community di Yogyakarta [online] tersedia pada URL: <<http://www.scribd.com/doc/8446011/Gated-Community-di-Yogyakarta>> [diakses pada 20 Juni 2009]
- Divisi Kependudukan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). 1995. *World Urbanization Prospects: The 1994 Revision [Prospek Urbanisasi Dunia: Revisi 1994]*. New York: PBB.
- Gated community [online] tersedia pada URL: <[http://en.wikipedia.org/wiki/Gated\\_community](http://en.wikipedia.org/wiki/Gated_community)> [diakses pada 17 Juni 2009]
- Kamil, Ridwan, 2008. Arogansi "Gated community" di Kota Kita [online] tersedia pada URL: <<http://ridwankamil.wordpress.com/2008/10/02/arrogansi-gated-community-di-kota-kita/>> [diakses pada 15 Juni 2009]
- Maharika, 2007. Kriminalitas dan Ruang Kota [online] tersedia pada URL: <<http://maharika.staff.uui.ac.id/?s=berpagar> > [diakses pada 17 Juni 2009]
- Praduwiratna, Rangga, 2007. Pembongkaran Portal Jalan di Jakarta [online] tersedia pada URL: <<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pid=20&jd=Pembongkaran+Portal+Jalan+di+Jakarta&dn=22009060112154>> [diakses pada 18 Juni 2009]
- Rahmah, Andi dkk, 2004. Loe Loe, Gue Gue : Hancurnya Kerekatan Sosial, Rusaknya Lingkungan Kota Jakarta [online] tersedia pada URL: <[http://www.pelangi.or.id/publikasi/2006/loe\\_loe\\_gue\\_gue.pdf](http://www.pelangi.or.id/publikasi/2006/loe_loe_gue_gue.pdf)> [diakses pada 17 Juni 2009]
- Utomo, Gated community Palsu di Kota Kita. Kompas, 19 Februari 2001